

BAB VI PENUTUP

Berbagai capaian kinerja telah diraih dalam penyelenggaraan pembangunan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan beberapa indikator kinerja pembangunan daerah, sebagai berikut: (1) Indikator Kesejahteraan Masyarakat, (2) Indikator Good Governance, (3) Indikator Pelayanan Dasar, dan (4) Indikator Daya Saing Daerah, serta (5) Posisi Kinerja Jawa Barat dalam Konstelasi Nasional.

(1) Kesejahteraan Masyarakat

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sebesar 47.379.389 jiwa pada Tahun 2016. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, kondisi penduduk Jawa Barat menjadi potensi dan tantangan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mencapai keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari 1,47% pada Tahun 2015 menjadi 1,43% Tahun 2016. Selain itu, capaian keberhasilan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Jawa Barat diwujudkan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang layak. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat meningkat dari 69,49 poin pada tahun 2015 menjadi 70,19 poin pada Tahun 2016. Keberhasilan dalam peningkatan IPM Jawa Barat ditopang oleh keberhasilan dalam pencapaian Indeks Pendidikan sebesar 60,45 poin pada tahun 2015 menjadi 61,39 poin pada tahun 2016. Indeks Kesehatan sebesar 80,80 poin pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 81,05 poin pada tahun 2016.

Beberapa indikator pembangunan yang menunjukkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat pada Tahun 2016, antara lain: pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di atas 5% (sebesar 5,67% pada tahun 2016, angka tersebut masih diatas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,02%); pencapaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebesar Rp.1.275,55 triliun sedangkan PDRB per Kapita atas dasar harga konstan Jawa Barat pada tahun 2016 sebesar Rp.26,92 juta, dimana angka tersebut diatas target pencapaian yaitu 11-13 juta rupiah, sedangkan

dalam pengendalian jumlah penduduk miskin, pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 9,57% pada Tahun 2015 menjadi 8,77% pada Tahun 2016.

(2) Good Governance.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan good governance. Pencapaian keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan pembangunan tata pemerintahan daerah pada Tahun 2016, berdasarkan spirit di atas ditunjukkan dalam pencapaian Indikator Good Governance, yang dibangun oleh 3 (tiga) komponen dasar, yaitu: partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi.

Pertama, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pembangunan Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk melibatkan seluruh stakeholders pembangunan Jawa Barat berdasarkan pendekatan 'Jabar Masagi', yang ditandai dengan adanya dukungan dan keterlibatan yang nyata dari unsur-unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha dan komunitas masyarakat di Jawa Barat. Dukungan dan keterlibatan unsur-unsur 'Jabar Masagi' dalam penyelenggaraan pembangunan Jawa Barat dari ruang lingkup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan serta pengendalian kegiatan pembangunan Jawa Barat. Dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan Jawa Barat, partisipasi masyarakat telah diwadahi melalui penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang dalam wujud musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkatan desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, wilayah, provinsi hingga nasional; serta implementasi Sistem Informasi Manajemen RKPD Jabar Online 2101. Kedua media tersebut telah memberikan tempat bagi komunitas atau kelompok masyarakat untuk menyampaikan berbagai usulan kebutuhan dalam rencana pembangunan di suatu wilayah atau daerah.

Selanjutnya dalam ruang lingkup pelaksanaan pembangunan Jawa Barat, partisipasi masyarakat telah diwadahi melalui penyelenggaraan pembangunan masyarakat atau kelompok masyarakat/lembaga masyarakat berbasis pada anggaran bantuan sosial (bansos) atau bantuan hibah. Penyelenggaraan pembangunan masyarakat atau kelompok masyarakat/lembaga masyarakat dengan pendekatan ini telah memberikan tempat bagi masyarakat atau kelompok masyarakat/lembaga masyarakat secara aktif, mandiri, gotong-royong dan bertanggungjawab untuk mengimplementasikan usulan-usulan kebutuhan dalam rencana pembangunan di suatu wilayah atau daerah.

Demikian juga dalam ruang lingkup pengawasan dan pengendalian pembangunan Jawa Barat partisipasi masyarakat telah diwadahi melalui penyelenggaraan pengawasan

pembangunan Jawa Barat dengan melibatkan peran dan partisipasi masyarakat atau kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat secara bertanggungjawab. Penyelenggaraan pengawasan pembangunan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dengan pendekatan ini telah memberikan tempat bagi masyarakat atau kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat secara aktif, profesional, mandiri dan bertanggungjawab untuk mengawasi jalannya berbagai kegiatan implementasi pembangunan pada suatu wilayah atau daerah di Jawa Barat.

Gambaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Jawa Barat melalui perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Jawa Barat pada Tahun 2016 tercermin melalui tingkat partisipasi masyarakat Jawa Barat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Jawa Barat, yang berdasarkan evaluasi dinilai cukup berhasil dengan tingkat partisipasi sebesar 62,58% dari target yang direncanakan sebesar 65%. Selanjutnya gambaran pencapaian keberhasilan tersebut juga diperkuat dengan capaian keberhasilan tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik yang diwujudkan dari pencapaian indeks demokrasi di Jawa Barat sebesar 73,04 poin lebih besar dari target yang direncanakan yaitu sebesar 67,00 poin.

Kedua, dalam meningkatkan akuntabilitas pada penyelenggaraan pembangunan Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk menyelenggarakan sistem pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang taat dan patuh terhadap semua ketentuan peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Selanjutnya, dengan didukung oleh sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi komputer dan SDM pengelola keuangan daerah yang profesional, maka semakin mewujudkan akuntabilitas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terutama dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pada Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mendapatkan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" dari BPK RI selama lima kali berturut-turut, dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan "Anugerah TEPPA" dengan predikat terbaik 2 (dua) Tingkat Nasional.

Ketiga, dalam meningkatkan transparansi pada penyelenggaraan pembangunan Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat berbasis komputer dengan melibatkan kabupaten/ kota di seluruh Jawa Barat. Implementasi SIPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut, juga dalam rangka memenuhi ketentuan tentang Penyelenggaraan Informasi Pembangunan Daerah

kepada masyarakat dan stakeholders pembangunan di Jawa Barat, berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan upaya yang sungguh-sungguh dalam mewujudkan transparansi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mendapatkan respon yang positif dari masyarakat dan stakeholders pembangunan Jawa Barat yang terkait. Hal tersebut dicerminkan dengan diperolehnya berbagai penghargaan pada tingkatan nasional dalam pelayanan publik, seperti Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016. Selain itu, capaian keberhasilan dalam mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tercermin melalui pencapaian Indeks Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan sebesar 4,97 meningkat 0,18 poin dari tahun 2015 dan Indeks Skala Kepuasan Masyarakat sebesar 3,21 poin yang memberikan gambaran kondisi yang baik.

(3) Pelayanan Dasar

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat melalui pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Pencapaian keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pada Tahun 2016, ditunjukkan dalam pencapaian beberapa keberhasilan, sebagai berikut:

Pertama, melalui bidang pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di seluruh Jawa Barat melalui pemenuhan alokasi pendanaan pendidikan sebesar 20% dari total APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang digunakan berbagai peruntukan penting dan mendasar, yaitu : (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penyelenggaraan layanan Pendidikan Dasar dan Menengah bagi sekolah negeri maupun swasta. (2) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi SMP/MTs, SMA/MA dan SMK negeri maupun swasta. (3) Peningkatan kualitas dan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah negeri maupun swasta.

Capaian keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan dicerminkan dari pencapaian peningkatan Indeks Pendidikan dari 60.45 poin pada Tahun 2015 meningkat menjadi 61.39 poin pada Tahun 2016; pencapaian peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten sebesar 7.15 tahun pada Tahun 2015 menjadi 7.22 tahun pada Tahun 2016;

pencapaian peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016 hingga mencapai 67,56%; pencapaian peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan Tinggi Tahun 2016 mencapai 17,76%.

Kedua, melalui bidang Kesehatan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di seluruh Jawa Barat melalui pembangunan sarana di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, mencakup pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan, Perkantoran dan Perparkiran; Gedung Radioterapi; serta pengadaan alat-alat kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan, baik di Gawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat Inap, ICCU, ICU, HCU, Stoke Unit, Bedah Central, Kebidanan dan Perinatologi, dan penunjang medik, serta pengadaan obat dan bahan penunjang medis serta pelayanan kesehatan. RSUD Al Ihsan menyediakan pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu yang tidak dijamin oleh program BPJS dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara langsung. Selain itu, capaian keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dicerminkan dengan pencapaian Indeks Kesehatan dari 80,80 poin pada Tahun 2015, menjadi 81,05 poin pada Tahun 2016, Angka Harapan Hidup (AHH) dari 72,52 tahun pada Tahun 2015 menjadi 72,68 tahun pada Tahun 2016.

Ketiga, melalui pembangunan infrastruktur yang merupakan kegiatan Bidang Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Upaya tersebut dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur No. 500 Tahun 2014 tentang Fokus Pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat, yang terdiri atas 37 Program dan Kegiatan Unggulan Provinsi Jawa Barat. Beberapa fokus yang terkait dengan bidang pekerjaan umum di antaranya: peningkatan infrastruktur desa dan perdesaan, rehabilitasi 100.000 unit rumah rakyat miskin, cetak sawah baru 100.000 Ha, perbaikan dan pengelolaan jaringan irigasi terpadu, pembangunan tol dan jalan lintas cepat, persiapan pembangunan aerotropolis (Bandara Internasional Jawa Barat dan Aerocity Kertajati).

Capaian keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pekerjaan umum ditunjukkan dengan meningkatnya Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi menjadi sebesar 72,06%, Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik sebesar 65,64%, Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan sebesar 66,26%, Cakupan Pelayanan Air Minum sebesar 71,14%, dan Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik dan sedang) sebesar 98,01% di Tahun 2016. Di samping itu Pemerintah Provinsi telah membantu pemerintah Kabupaten/Kota dalam memperbaiki jalan milik

Kabupaten/Kota, serta membangun dan memperbaiki 23 jembatan gantung. Prestasi yang sangat luar biasa yang telah ditunggu oleh masyarakat Jawa Barat sepanjang 54 Tahun ini adalah telah selesainya pembangunan dan penggenangan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang yang diperkirakan akan sangat berdampak signifikan dan positif pada pertumbuhan ekonomi kemasyarakatan.

(4) Daya Saing Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan daya saing daerah dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keunggulan Provinsi Jawa Barat, melalui berbagai langkah antara lain: (1) menarik modal luar negeri, swasta dan modal publik; melalui komunikasi dengan investor dan lembaga keuangan dan (2) mendorong penciptaan tenaga kerja terampil, menciptakan lingkungan yang kondusif dan menyediakan pasar kerja dengan program penyediaan 2 (dua) juta lapangan kerja.

Capaian keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada peningkatan daya saing daerah ditunjukkan dengan capaian realisasi investasi di Jawa Barat pada Tahun 2016 dengan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 79,99 triliun rupiah; nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 68,05 triliun rupiah; nilai investasi PMA-PMDN sebesar 193,04 triliun rupiah berdasarkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB); Nilai Investasi (PMTB) atas dasar harga berlaku sebesar 412,30 triliun Rupiah.

Capaian keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam peningkatan daya saing daerah ditopang oleh kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PMA/PMDN melalui pembinaan dan pemantauan PMA/PMDN di 27 Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi guna tersampainya informasi potensi investasi Jawa Barat kepada 500 calon investor di dalam maupun luar negeri, opinion makers dan stakeholders lainnya untuk meningkatkan minat investasi di Jawa Barat. Di samping itu, dalam rangka peningkatan daya saing daerah telah diwujudkan berbagai Inovasi Daerah Unggulan Jawa Barat, di antaranya:

- 1) Inovasi di bidang Pelayanan Publik meliputi :
 - a. Pengembangan Sistem RKPD Jabar Online 2101 (e-planning) dan Sistem Aplikasi e-monev Jabar dalam rangka monitoring, evaluasi, dan perencanaan tahunan pembangunan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat secara terintegrasi dan berbasis online;

- c. Penyusunan Basis Data Kemiskinan melalui Aplikasi Kilometer Nol (KM-0) Pro Poor, sehingga terwujud sinergitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat;
 - d. Pengembangan Sistem Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) dalam Pengelolaan Barang dan Aset Daerah, yang menjadikan Jawa Barat memperoleh predikat WTP dalam pengelolaan aset/barang milik daerah;
 - e. Pelayanan e-samsat online;
 - f. Penerapan e-Procurement atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional;
 - g. Perijinan Online, merupakan aplikasi yang bisa diunduh melalui handphone yang memberi kemudahan bagi masyarakat/ pengusaha untuk mengajukan perijinan;
 - h. Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2005 pada penyelenggaraan LPSE, yang meliputi: registrasi, verifikasi, training, tendering, helpdesk, data center dan technical support;
- 2) Inovasi di Bidang Keuangan Daerah, melalui Inisiasi Rencana Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 4 triliun sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Inisiasi ini merupakan yang pertama dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia, bahkan Jawa Barat telah diberikan peringkat AA- oleh Lembaga Pemeringkat Nasional dalam kaitannya dengan kemampuan memenuhi kewajiban sebagai obligor;
 - 3) Inisiasi Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Strategis Nasional, melalui Pembangunan Aerotropolis (Bandara Internasional Jawa Barat dan Aerocity Kertajati).
 - 4) Inovasi Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditunjukkan dengan pemberian skema kredit tanpa agunan dengan bunga murah/terjangkau kepada usaha mikro dan kecil, yang dinamakan Kredit Cinta Rakyat (KCR).
 - 5) Inovasi bidang Pendidikan melalui Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) pada tahun 2016 bagi SMP Negeri sebanyak 150 ruang, 699 ruang bagi SMP/MTs Swasta, untuk meningkatkan daya tampung sekolah dan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi SMA/SMK/MA Swasta sebanyak 541 ruang, serta SMA/SMK Negeri 162 ruang.

(5) Posisi Jawa Barat dalam Konstelasi Nasional

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menempatkan posisi Provinsi Jawa Barat dalam konstelasi nasional secara signifikan, strategis dan penting untuk

mencerminkan tentang kemajuan dan keunggulan Provinsi Jawa Barat terhadap provinsi lain di Indonesia. Penempatan posisi Provinsi Jawa Barat dalam konstelasi nasional secara signifikan, strategis dan penting dipetakan berdasarkan capaian kinerja pembangunan dan raihan berbagai prestasi atau penghargaan pada tingkatan nasional.

1) Kinerja pembangunan

Kinerja pembangunan Provinsi Jawa Barat dapat digambarkan pula dalam konstelasi Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Jawa Barat memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 13,09 %.
- b. Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Jawa Barat menempati peringkat ke-1 tingkat nasional, dengan nilai investasi PMA Jawa Barat mencapai 72,87 triliun rupiah.
- c. Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Jawa Barat menduduki peringkat ke-2 dibawah Jawa Timur dengan nilai investasi PMDN 30,36 triliun rupiah. Tingginya nilai investasi PMDN Jawa Barat mencerminkan iklim investasi yang semakin membaik.
- d. Jumlah koperasi aktif di Jawa Barat sebanyak 16.855 unit berada di posisi ke 3 setelah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah.
- e. Provinsi Jawa Barat berkontribusi sebesar 15,09 persen terhadap produksi padi (GKG) Nasional, terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Timur yaitu 12,54 juta ton.
- f. Provinsi Jawa Barat juga merupakan daerah produsen daging sapi (77,23 ribu ton atau 14,89% terhadap produksi daging sapi Indonesia) kedua terbesar setelah Provinsi Jawa Timur dan Produsen utama daging ayam (644,92 ribu ton atau 32,58% terhadap produksi daging ayam Indonesia).
- g. Produksi perikanan budidaya Jawa Barat menempati peringkat ke 1 di Indonesia. Produksi perikanan budidaya kolam menghasilkan 478,76 ribu ton, budidaya jaring apung 185,01 ribu ton dan mina padi 30,53 ribu ton.

2) Penghargaan Tingkat Nasional

Keberhasilan pembangunan Jawa Barat selama Tahun 2016 ditunjukkan juga oleh peraihan prestasi dan penghargaan Tingkat Nasional, sebagai berikut:

- (1) Penghargaan Bawaslu Award 2016, yang diberikan oleh Bawaslu. Bandung, Selasa 29 Maret 2016.
- (2) Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016, yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Pada Jatim Expo Internasional. Surabaya, Kamis 31 Maret 2016.

- (3) Penghargaan Government Award 2016 Kategori Wisata, yang diberikan oleh Sindo Weekly. Grand Sahid Jaya Hotel Ballroom Puri Agung Jakarta, Selasa 12 April 2016.
- (4) Penghargaan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha, yang diberikan oleh Wakil Presiden RI bertempat di Alun-alun Kulonprogo Yogyakarta. Yogyakarta, Senin 25 April 2016.
- (5) Penghargaan Atas Prestasi Kinerja dengan Predikat Sangat Tinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri bertempat di Alun-alun Kulonprogo Yogyakarta. Yogyakarta, Senin 25 April 2016.
- (6) Penghargaan K3 dari Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi, yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi. Jakarta, Rabu 18 Mei 2016.
- (7) Penghargaan Pengelolaan Kepegawaian Terbaik Tingkat Provinsi, yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara. Jakarta, 26 Mei 2016.
- (8) Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015, yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Bandung, Kamis 2 Juni 2016.
- (9) Anugerah Perlindungan Anak KPAI, yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pada Tanggal 27 Juni 2016 di Jakarta.
- (10) Penghargaan Nirwasita Tantra 2016 Tingkat Provinsi pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2016 Tingkat Nasional, yang diberikan oleh Wakil Presiden RI di Istana Siak Sri Indrapura Provinsi Riau pada tanggal 22 Juli 2016.
- (11) Penghargaan Manggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, yang diberikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada Tanggal 28 Juli 2016 di Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- (12) Penghargaan Efisiensi Energi Nasional tahun 2016 dari Kementerian ESDM kategori penghematan energi dan air sub kategori pemerintah daerah yang diberikan oleh Kementerian ESDM. Jakarta, Kamis 4 Agustus 2016.
- (13) Anugerah Budhipura dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) yang diberikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Solo, Senin 10 Agustus 2016.
- (14) Anugerah Kepala Daerah Inovatif 2016, Kategori Pembangunan Pendidikan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, pada tanggal 11 Agustus di Intercontinental Hotel Bandung.
- (15) Juara 1 Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Terbaik Nasional Tahun 2016 yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2016 di Jakarta.
- (16) Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut - turut (Tahun Anggaran 2011 - 2015) yang diberikan oleh Presiden RI, pada tanggal 20 September 2016 Istana Negara Jakarta.

- (17) Indonesia's Attractiveness Award 2016 yang diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika pada tanggal 22 September 2016 di Hotel Mulia Senayan Jakarta.
- (18) Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilannya menindaklanjuti hasil pengawasan, dan evaluasi Kemendagri terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri pada Tanggal 26 September 2016 di Hotel Borobudur.
- (19) Bhumandala Award 2016 yang diberikan oleh Menteri PPN/ Bappenas RI & BIG pada 17 Oktober 2016 di Dyandra Convention Center Surabaya, Jawa Timur.
- (20) Penghargaan National e-Procurement Award 2016 yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 3 November di Balai Kartini Jakarta.
- (21) Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 21 Desember 2016 di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Tantangan dan permasalahan yang terjadi selama kurun waktu 2016, merupakan bagian dari proses pembangunan yang perlu terus untuk diselesaikan, sehingga di masa mendatang perwujudan Visi dan Misi Jawa Barat dapat lebih berkualitas yang sekaligus merupakan Lesson Learned bagi berbagai pihak sebagai upaya cepat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang Maju dan Sejahtera untuk semua.

Berdasarkan capaian dan tantangan pelaksanaan pembangunan Tahun 2016, untuk lebih meningkatkan kinerja pembangunan Jawa Barat Tahun 2017, diperlukan hal penting sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan hasil pembangunan yang dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat, maka pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran agar dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, sehingga menghindari kondisi menumpuknya tagihan pembayaran pekerjaan pada akhir Triwulan IV.
- 2) Pentingnya koordinasi yang efektif antar OPD/Biro dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan.
- 3) Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.
- 4) Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah.